

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu berasal dari singkatan yaitu Pemilihan Umum atau dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional disebut dengan istilah *election*. Pemilu menjadi lambang dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan terbuka dan menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Pemilu menjadi arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Syarat untuk melaksanakan Pemilu yang demokratis tentu dengan menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang diistilahkan dengan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Pemilu, rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka di parlemen bagi legislatif dan eksekutif yang rutin digelar dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 5 tahun sekali.

Secara historis, Pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan sebanyak dua belas kali yaitu Pemilu 1955 di masa Orde Lama, Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, Pemilu 1997 dimasa Orde Baru, serta Pemilu di masa Orde Reformasi yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Pemilu selanjutnya di era Reformasi yaitu Pemilu 2019 akan diselenggarakan pada tahun 2019 mendatang. Sebelum menerangkan mengenai pemilu di era Reformasi terlebih dahulu dibahas mengenai latar belakang lahirnya era Reformasi yang dimulai pada 1998 menjadi awal pemilu demokratis di Indonesia. Latar belakang dari terselenggaranya Pemilu di era Reformasi adalah melemahnya pemerintah Orde Baru hingga turunnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 serta terjadinya peralihan kekuasaan ke era Reformasi.

Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, hampir seluruh belahan dunia dilanda oleh angin besar proses demokratisasi. Perjuangan menuju tatanan itu menjadi ciri penting perkembangan politik di masa tersebut. Hal tersebut dimulai dari runtuhnya rezim fasis Portugal 1974, hingga puncaknya pada masa transisi

demokrasi di Eropa Timur 1989 (Prasetyantoko,dkk, 2001, hlm. 13). Gelombang demokratisasi tersebut berlanjut hingga ke Asia termasuk ke Indonesia (Prasetyantoko, Dkk, 2001, hlm. 15). Demokratisasi sering dikaitkan dengan persoalan negara otoriter dan rezim fasis atau militeristik. Dalam hal menghadapi sistem negara tersebut dalam masyarakat muncul kekuatan *civil society* baik secara wacana maupun secara praktis yang menggugat legitimasi kekuasaan tersebut (Prasetyantoko, Dkk, 2001 hlm. 14). Salah satu *civil society* tersebut dalam konteks Indonesia adalah gerakan mahasiswa 1998 yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru.

Jika dilihat secara kronologis antara terjadinya gelombang gerakan mahasiswa sebagai penggerak dan mengubah haluan politik Indonesia dari rezim Orde Baru menuju masa Reformasi hingga sekarang momentumnya dimulai dari kembalinya Soeharto sebagai presiden RI pada Sidang Umum MPR 1997. Gerakan oposisi terhadap rezim Soeharto sebenarnya sudah terjadi sebelum tahun politik 1997. Gerakan oposisi tersebut diwakili oleh dua Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yaitu PDI dan PPP yang sudah mempersiapkan strategi politik menentang pemerintahan (Soeharto) setidaknya satu tahun sebelum Pemilu 1997. Di PDI terdapat tokoh populer oposisi yaitu Megawati yang populer dikalangan pro-demokrasi serta menjadi simbol reinkarnasi Soekarno. Presiden Soeharto menyikapi popularitas Megawati tersebut menjegal Megawati dari kursi ketua Umum PDI pada kongres luar biasa PDI 1996 serta terjadinya peristiwa 27 Juli 1996. Sedangkan dari PPP terdapat tokoh yang vokal yaitu Sri Bintang Pamungkas (Azzam, 2014, hlm. 48-49).

Pemilu Mei 1997 yang diselenggarakan oleh pemerintah Orde Baru menjadi Pemilu paling rusuh serta memakan korban jiwa materi dan nyawa paling banyak. Selain itu, terjadi protes dan aksi anarki dari massa pendukung PPP di Madura sehingga Pemilu ulang segera dilaksanakan di daerah tersebut (Azzam, 2014, 50). Hasil pemilu 1997 menunjukkan Golkar meraih kemenangannya kembali dengan perolehan suara sebanyak 74,5 % dan pencalonan kembali Soeharto sebagai calon tunggal presiden dengan nominasi dari Golkar pada tanggal 20 Januari 1998, dan pemilihan Soeharto serta wakil presiden B.J Habibie secara aklamasi sebagai presiden RI untuk yang ketujuh

kalinya pada sidang MPR 11 Maret 1998. Pada tanggal 14 Maret 1998 Soeharto membentuk kabinet barunya dengan menyertakan Siti Hardianti Rukmana sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial dan teman dekatnya Bob Hasan Sebagai Memperindag (Sudjono dan Leiressa, 2010, hlm. 666). Dalam beberapa minggu setelah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap presiden Soeharto tumbuh subur yang ditandai oleh lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto sebagai Presiden (Sudjono dan Leiressa, 2010, hlm. 667). Krisis Ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan mahasiswa dan rakyat secara besar-besaran. Tuntutan utama gerakan mahasiswa adalah menuntut mundur Soeharto sebagai Presiden RI karena rezim Orba sudah tidak dapat diharapkan dalam mereformasi Rezimnya (Saleh, 2015, hlm. 73-74).

Puncaknya gerakan mahasiswa semakin menemukan momentumnya pasca terjadinya peristiwa Trisakti serta diikuti oleh peristiwa kerusuhan massal di berbagai daerah di Indonesia khususnya daerah DKI Jakarta dan Surakarta (Saleh, 2015, hlm. 74). Legitimasi Soeharto sebagai presiden semakin sulit dipertahankan lagi akibat dipengaruhi pula oleh faktor dari internal rezim Orde Baru sendiri. Dukungan dari MPR terhadap Soeharto berbalik kepada mahasiswa. Dukungan fraksi ABRI, Golkar, dan Ketua MPR Harmoko untuk mengusulkan presiden Indonesia yang baru atau pengunduran diri Soeharto serta pembiaran Mahasiswa menduduki gedung MPR. Respon Soeharto untuk memenuhi aspirasi dari gerakan (Reformasi) mahasiswa yaitu dengan menemui tokoh islam terkemuka untuk dengar pendapat mengenai legitimasi jabatannya, Soeharto berjanji tidak akan mencalonkan lagi dalam Pemilu yang baru, serta membentuk kabinet reformasi tetapi gagal karena pengunduran diri 14 menteri dalam kabinet yang dibentuk oleh Soeharto (Ricklefs, 2008, hlm. 691). Soeharto pada akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 serta digantikan oleh Habibie yang membuka kran kebebasan baik pers maupun mengemukakan pendapat. Kebebasan semakin terwujud dengan diadakannya pemilu multipartai 1999 dengan kebebasan setiap

individu atau kelompok untuk mendirikan partai politik (Lasmiyati, 2009, hlm. 275-276). Partai politik kembali bergeliat pada era Reformasi serta *euforia* politik pada era Reformasi ditandai oleh bermunculan beragam partai politik (Labolo dan Ilham, 2015, hlm. 99). Perubahan politik tersebut diaplikasikan oleh Habibie yaitu dengan dikeluarkannya UU No.2 Tahun 1999 Tentang Parpol, UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan UU No.4 Tahun 1999 Tentang MPR dan DPR (Syafii dan Azhari, 2010, hlm. 102).

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan pasca Orde Baru. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 diseluruh wilayah di Indonesia (Ria Casmi Kharissa, 2014, hlm. 518). Pada Pemilu 1999 pertama kali penyelenggara Pemilu bersifat independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pelaksanaannya amat transparan (terbuka) karena melibatkan lembaga pengawas independen baik Lokal maupun Asing (Sudawirrahmi, 2009, hlm. 49). Bahrul Ulum (2002, hlm. 156) menjelaskan mengenai Pemilihan Umum 1999 sebagai berikut "*Secara Umum pelaksanaan Pemilu 1999 dinilai oleh sejumlah lembaga pemantau pemilu independen sudah jauh lebih baik dan memenuhi syarat sebagai 'free and fair election', dibanding dengan pemilu-pemilu Orde Baru*". Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Blair King yang menyatakan Pemilu 1999 sudah memenuhi syarat sebagai pemilu yang demokratis (Ulum, 2002, hlm. 156). Walaupun Pemilu 1999 dapat disebut sebagai pemilu yang demokratis, tetapi dalam pelaksanaannya masih mengadopsi beberapa sistem pada Pemilu zaman Orde Baru seperti penggunaan sistem proporsional daftar tertutup, susunan MPR masih menggunakan utusan daerah dan utusan golongan, dan KPU masih melibatkan pemerintah ditambah anggota partai politik (Listia, 2015, hlm. 63).

Setelah pemilihan umum Legislatif 1999 adalah Pemilihan presiden melalui Sidang Umum MPR. Dalam pemilihan presiden terdapat 2 calon yaitu Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid. Pemilihan Presiden 1999 lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu sebelumnya (Kamaluddin dan Alfian, 2015, hlm. 142). Dalam pemilihan presiden setelah Pemilu 1999, terjadi dua kali pergantian presiden yaitu pemilihan pertama pada Sidang Umum MPR 1999 terpilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil

Presiden. Pemilihan kedua dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001 Megawati terpilih sebagai presiden dengan wakilnya Hamzah Haz pasca pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden oleh MPR. Pemilihan Presiden tidak langsung melalui Sidang MPR pasca Pemilu 1999 menjadi pemilihan tidak langsung terakhir di era Reformasi (Fatwa, 2004, hlm. 66).

Pemilu 2004 merupakan Pemilu kedua yang diselenggarakan pada era Reformasi. Pada Pemilu 2004 pertama kalinya diterapkan pemilu sebanyak 2 kali yaitu pemilu pertama Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (legislatif) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 5 April 2004 dan pemilu kedua yaitu Pemilu Pilpres yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 tetapi dapat dilakukan dalam dua putaran jika tidak ada Capres yang memenuhi suara lebih dari 50% (Listia, 2015, hlm. 57). Pemilu tahun 2004 dapat dilaksanakan dengan penerapan nilai demokrasi yang baik walaupun dalam kondisi dalam negeri yang banyak dilanda tantangan kasus pemboman (terorisme) dan gerakan separatis seperti GAM (Ricklefs, 2004, hlm. 677-679). Dalam pemilu 2004 terjadi perubahan luar biasa dalam berdemokrasi apalagi dengan diamandemennya UUD 1945 yang mengubah sistem politik Indonesia dengan adanya pemilihan presiden secara langsung (Anwar dan Salviana, 2006, hlm. 7).

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada masa Reformasi. Pemilu 2009 yang terdiri dari Pemilu Legislatif diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 dan Pemilihan Presiden pada tanggal 5 Juli dengan satu putaran. Penyelenggaraan kampanye parpol peserta pemilu dan calon legislatif dilakukan sejak tanggal 11 Juli 2008 atau memiliki waktu tenggang selama 9 bulan (Rasyid, 2009, hlm. 109). Terjadi perubahan masa kampanye dalam pemilu 2009 dari Pemilu sebelumnya yaitu dari satu bulan menjadi 9 bulan (Rasyid, 2009, hlm. 111). Dalam Pemilu tahun 2009 pertama kali diterapkan *Parliamentary Threshold* sebesar 2,5% bagi partai peserta Pemilu untuk mendapatkan kursi dan lolos di parlemen (DPR Pusat) (Perpustakaan Nasional RI, 2009). Pelaksanaan Pemilu 2009 dibandingkan pemilu era reformasi sebelumnya banyak menuai kritik atau terjadi masalah dalam penyelenggaraannya. Masalah yang terdapat dalam Pemilu 2009 antara lain kekurangsiapan KPU dalam

penyelenggaraan Pemilu 2009 serta masalah paling kontroversial yaitu adanya masalah carut-marutnya DPT (Daftar Pemilih Tetap) (Mochamad Nurhasim, 2009, hlm. 5). Dalam Pemilu 2009 seharusnya penyelenggaraan Pemilu lebih baik lagi dari Pemilu Reformasi sebelumnya karena kondisi keamanan dalam negeri sudah lebih stabil dari Pemilu tahun 1999 dan Pemilu tahun 2004.

Pemilu 2014 merupakan pemilu ke empat yang dilaksanakan pada masa Reformasi. Pada pemilu 2014 partai peserta pemilu mengalami penyusutan dari Pemilu tahun 2009 menjadi hanya 12 partai. Hal tersebut disebabkan oleh syarat yang lebih ketat bagi partai peserta pemilu yang ingin mengikuti Pemilu Legislatif 2014 (Prihatin, 2014). Pemilu 2014 menjadi pemilu pertama pula yang mulai menerapkan sistem multipartai sederhana baik dari jumlah partai maupun jarak ideologinya (Suwarko, 2013, hlm. 286). Dalam Pemilu 2014 pula *Parlementary Threshold* ditingkatkan lagi menjadi sebesar 3% dari pemilu tahun 2009 yang sebesar 2,5% (Pahlevi, 2014, hlm. 17). Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 secara umum berjalan aman dan tertib. Pada Pemilu Legislatif 2014 terjadi penurunan partisipasi pemilih yaitu jumlah suara sah sekitar 67 persen sedangkan angka suara tidak sah serta golput mencapai 33 persen. Catatan penting dalam Pemilu 2014 yaitu masalah distribusi logistik, kedua masalah DPT, ketiga sistem pemberian surat suara yang menyulitkan pemilih, dan keempat ketidaksinkronan penghitungan suara di tingkat KPU provinsi dengan pemungutan suara di tingkat bawah akibat praktek jual-beli suara dan politik uang yang melibatkan oknum panitia pemilihan tingkatan (Agustino, 2014, hlm. 110-113). Pada pemilu 2014 terjadi perbaikan penyelenggaraan Pemilu dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2009 seperti tingkat partisipasi pemilih yang (dalam Pemilu legislatif) 2014 lebih tinggi dari Pemilu 2009, persiapan anggota KPU nampak lebih siap karena sudah dilantik sejak tahun 2012 (Parlementaria, 2014, hlm. 20).

Kontestasi dalam Pemilihan Presiden secara langsung terjadi fluktuasi. Pada Pemilu 2004 pemilihan presiden terjadi dalam dua putaran dan memiliki pasangan calon presiden terbanyak yaitu sebanyak 5 calon dengan kemenangan pada pasangan SBY-JK. Pada pemilu 2009 Pemilihan Presiden berlangsung hanya 1 putaran dengan 3 calon Presiden dan kemenangan pasangan SBY-Boediono dengan 60% suara. Pada Pemilu 2014 pemilu berlangsung 1 putaran dengan 2

calon presiden dan persaingan pemilihan presiden berlangsung dengan cukup ketat karena pemenang pemilihan presiden hanya menang tipis dari calon presiden lawan yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK (Detiknews.com, 2014).

Apa alasan penulis mengangkat penelitian skripsi ini ? Penulis mengangkat penelitian skripsi mengenai Pemilu era Reformasi dari tahun 1999 hingga tahun 2014 karena penelitian ini berdasarkan observasi penulis terhadap beberapa sumber skripsi yang nampak masih kurang mengkaji Pemilu era Refroamsi dengan serius. Dalam penelitian skripsi yang lain nampaknya hanya mengkaji Pemilu Reformasi secara parsial, cenderung mengandalkan kajian lokal, dan tidak lengkap rentang waktu penyelenggaraan Pemilu pada Era Reformasi dari tahun 1999 hingga Pemilu tahun 2014. Penelitian skripsi ini juga termasuk dalam penelitian sejarah kontemporer karena rentang waktu antara tahun 2017 dengan awal pemilu era Reformasi diselenggarakan tidak begitu jauh yaitu kurang lebih 18 tahun. Penelitian mengenai Pemilu era Reformasi pula menjadi amat penting karena merupakan Pemilu era Reformasi merupakan simbolisasi dari nilai demokrasi serta amanat perjuangan Reformasi 1998 masih terus berlangsung hingga dewasa ini. Selain itu, perkembangan demokrasi Indonesia yang semakin menunjukkan nilai demokratisnya dari Pemilu ke Pemilu walaupun belum mencapai konsolidasi demokrasi sehingga Indonesia dewasa ini menjadi negara penganut demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Oleh karena alasan-alasan tersebut serta ketertarikan penulis terhadap penelitian Sejarah mengenai Pemilu era Reformasi, maka penulis mengangkat penelitian mengenai Pemilu di era Reformasi dalam Skripsi yang Penulis susun dengan Judul Skripsi yaitu **“SEJARAH PEMILU DEMOKRATIS DI INDONESIA TAHUN 1999-2014”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba mengemukakan permasalahan utama yaitu “Bagaimana Sejarah Dari Pemilu Demokratis di Indonesia dari Pemilu 1999 hingga Pemilu tahun 2014 ?”.

Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana sejarah perencanaan dan pelaksanaan dalam pemilu era Reformasi ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan karakteristik dalam Pemilu era Reformasi ?
3. Bagaimana gagasan atau latar belakang diadakannya Pemilu langsung presiden dan wakil presiden pada Pemilu era Reformasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas pada point sebelumnya, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses atau perencanaan dalam Pemilu zaman Reformasi.
2. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan karakteristik dalam Pemilu 1999-2014.
3. Mendeskripsikan latar belakang gagasan diadakannya pemilu langsung presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999-2014.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian dalam Skripsi yang disusun oleh penulis antara lain :

1. Sebagai bahan dokumentasi dalam meneliti dan mengkaji Sejarah Pemilu Indonesia di era Reformasi dan Sejarah Nasional Indonesia di era Reformasi.
2. Untuk memperkaya khasanah dalam penulisan Sejarah Kontemporer di Indonesia dan Sejarah Nasional Indonesia khususnya di era Reformasi.
3. Sebagai bahan ajar dan rujukan bagi guru SMA dan siswa SMA dalam mengkaji Sejarah Indonesia Modern yaitu Sejarah Nasional Indonesia Pasca Orde Baru atau era Reformasi.

## **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi dalam penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai penelitian skripsi, alasan serta minat penulis dalam penelitian skripsi. Bab I terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini dijelaskan mengenai teori dan konsep yang berhubungan dengan judul skripsi yang diteliti dalam skripsi penulis. Dalam bab 2 dijelaskan pula mengenai sumber sejarah yang relevan dengan penelitian skripsi baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi, laporan, dokumen-dokumen, dan dari sumber online/internet serta kajian terdahulu yang dipilih oleh penulis yang dianggap relevan dengan penelitian Skripsi penulis.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri atas 3 bagian yaitu bagian pertama yaitu penggunaan metode dan teknik. Dalam bagian ini penulis menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu metode historis serta teknik penelitian menggunakan teknik studi literatur. Bagian kedua bab ini yaitu bagian persiapan penelitian terdiri atas sub bab penentuan dan pengajuan tema penelitian, penyusunan rancangan penelitian dan proses bimbingan. Serta bagian ketiga dalam bab ini yaitu bagian pelaksanaan penelitian yang terdiri atas tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini diterangkan mengenai temuan dan pembahasan mengenai penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis mengenai Pemilu era Reformasi yang akan menjawab rumusan masalah dalam Skripsi. Dalam bab ini penulis membagi penelitian ke dalam sub tema berdasarkan kepada rumusan penelitian dan tujuan penelitian yaitu pertama mengenai jalannya proses atau perencanaan pada pemilu zaman Reformasi, kedua mengenai persamaan dan perbedaan Pemilu 1999-2014 dan ketiga mengenai argumen atau gagasan diadakannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada Pemilu zaman Reformasi.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian dalam skripsi dan inti

dari bab-bab sebelumnya dalam skripsi, serta hasil temuan penulis tentang masalah yang dikaji dalam skripsi. Dalam bab ini terdapat rekomendasi yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi baik kepada penulis sendiri, dunia akademik, dan masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Anwar, M. Khoirul dan Salviana, Vina (Editor). (2006). *Perilaku Partai Politik: Studi Perilaku Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fatwa, A. M. (2004). *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi (Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamaluddin, Undang A. dan Alfian, Muhamad. (2015). *Dinamika Politik di Indonesia: Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Labolo, Muhamad. Dan Ilham, Teguh. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Prasetyantoko, dkk. (2001). *Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi Di Indonesia*. Bandung : Penerbit P.T Alumni.
- Ricklefs, M.C. (2004). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Yogyakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Yogyakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Syafiie, Inu Kencana dan Azhari. (2010). *Sistem Politik Indonesia (Era Soekarno, Hatta, Syahrir, Syafruddin, era Soeharto, Moerdani, Wiranto, Harmoko, Habibie, Era Gus Dur, Megawati, Amien Rais, Hamzah Haz, Era SBY, Kalla, Baasyir*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Sudjono dan Leiressa (Editor). (2010). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ulum, Bahrul. (2002). *BODOHNYA NU apa NU DIBODOHI?(Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik)*. Yogyakarta: Penerbit Ar Ruzz Press.

#### Sumber Artikel Jurnal :

Agustino, Leo. (2014). "Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2014". Dalam *Jurnal Prisma*. 33, (1). Hlm. 110-125. [Pdf]. Tersedia di : [http://rumahpemilu.com/laporan/referensi/28\\_Leo\\_Agustino\\_-\\_Pemilihan\\_Umum\\_Di\\_Indonesia\\_2014\\_-\\_Prisma\\_Vol.33\\_No.1\\_2014\\_bi.pdf](http://rumahpemilu.com/laporan/referensi/28_Leo_Agustino_-_Pemilihan_Umum_Di_Indonesia_2014_-_Prisma_Vol.33_No.1_2014_bi.pdf). [Diakses di Bandung pada tanggal 30 Agustus 2017].

Kharissa, Ria. Casmi. (September 2014). "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi". Dalam *Jurnal Konstitusi*. 11, (3). Hlm.515-537. [Pdf]. Tersedia di : <https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/download/38/91> [Diakses di Bandung pada tanggal 28 Desember 2016].

Lasmiyati. (November 2009). "Pemilihan Umum Dalam Tinjauan Sejarah". dalam *Buddhiracana Majalah Sejarah dan Budaya*. 13, (1). Hlm. 270-279.

Nurhasim, Mochamad. (2009). "Dilema Sistem Pemilihan Umum 2009". *Jurnal Penelitian Politik*. 6, (1). Hlm. 5-20. [Pdf]. Tersedia di: <https://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/518/326>. [Diakses di Bandung pada tanggal 11 Agustus 2017].

Pahlevi, Indra. (Mei 2014). "Hasil Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2014 Dan Penerapan Parliamentary Threshold". dalam *Jurnal Info Singkat*. 6, (9). Hlm. 17-20. [Online]. Tersedia di : [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-9-I-P3DI-Mei-2014-22.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-9-I-P3DI-Mei-2014-22.pdf). [Diakses di Bandung pada tanggal 29 Desember 2016].

Rasyid, Fauzan Ali. (Juli-Desember 2009). "Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa". *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 25, (2). Hlm.109-117.

Sulaeman, Alfian. (April 2015). “Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah. *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Governemetal Science*. 1, (1). Hlm.12-24.

Suwarko, Andi. (Desember 2013). “Penyederhanaan Sistem Kepartaian Pasca Orde Baru”. dalam *Jurnal Review Politik*. 3, (2). Hlm. 279-297. [Pdf] Tersedia di : <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpolitik/article/download/24/23>. Diakses pada Tanggal [Diakses pada Tanggal 29 Desember 2016].

### **Sumber Skripsi :**

Azzam, Fajar Abdullah. (2014). “Peranan Gerakan Mahasiswa Bandung Tahun 1998 Dalam Proses Pergantian Orde Baru”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: FPIPS Jurusan Pendidikan Sejarah UPI.

Listia, Tania. (2015). “Perkembangan Sistem Politik Masa Reformasi Di Indonesia (Kajian Terhadap Perubahan Sistem Pemilihan Umum Orde Baru ke Reformasi Tahun 1971-2009)”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: FPIPS Jurusan Pendidikan Sejarah UPI.

Saleh, Rahman Nurdin. (2015). “Arah Politik Gerakan Islam (Studi Komparatif Terhadap Ikhwanul Muslimin di Mesir Tahun 1928-1949 Dengan Partai Keadilan Sejahtera Di Indonesia Tahun 1998-2009)”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: FPIPS Jurusan Pendidikan Sejarah UPI.

Sudawirrahmi. (2009). “Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Perbandingan Undang-Undang No.12 Tahun 2003 dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2008)”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Sumatra Utara : Universitas Sumatra Utara (USU).

### **Sumber Majalah:**

Tanpa Nama. (2014). Ironi Pemilu Legislatif 2014. *Parlementaria: Majalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*. Edisi 112 TH. XLIV.

### **Sumber Online/Internet :**

Panji Supriyadi, 2018  
**SEJARAH PEMILU DEMOKRATIS DI INDONESIA TAHUN 1999-2014**  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Perputakaan Nasional RI. (2009). “Pemilihan Umum Tahun 2009”. [Online]. Tersedia di : [http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=29&from\\_box=list&hlm=1&search\\_ruas=&search\\_keyword=&activation\\_status=](http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=29&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=). [Diakses di Bandung pada Tanggal 28 Desember 2016].
- Prihatin, A. (2013). “Permasalahan Demokrasi di Indonesia”. [Online]. Tersedia di : [http://www.kompasiana.com/anik.prihatini/permasalahan-demokrasi-di-indonesia\\_5529d4126ea834e03d552d0c](http://www.kompasiana.com/anik.prihatini/permasalahan-demokrasi-di-indonesia_5529d4126ea834e03d552d0c). [Diakses di Bandung pada Tanggal 26 Desember 2016].
- Tanpa Nama. (2014). “Melihat Perbandingan Pilpres 2004, 2009 dan 2014”. [Online]. Tersedia di : <http://news.detik.com/berita/2645367/melihat-perbandingan-pilpres-2004-2009-dan-2014>. [Diakses di Bandung pada Tanggal 29 Desember 2016].